

# Kepentingan Asean Dalam Kerjasama Asean-China Free Trade Area (ACFTA) 2018-2024

<sup>1</sup>Rizki Akbar, <sup>2</sup>M. Saeri, <sup>3</sup>Saiman Pakpahan

<sup>123</sup>Universitas Riau

Korespondensi : Rizki.akbar7659@studen.unri.ac.id

## Abstrak

*Pembentukan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi regional yang paling signifikan di kawasan Asia Timur. Perjanjian ini mencerminkan upaya ASEAN dalam merespons dinamika globalisasi, liberalisasi perdagangan, serta meningkatnya peran Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan ASEAN dalam kerja sama ACFTA pada periode 2018–2024. Fokus utama kajian diarahkan pada bagaimana ASEAN merumuskan dan menjaga kepentingan bersama di tengah peluang ekonomi dan tantangan struktural yang muncul akibat integrasi perdagangan bebas dengan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi institusi terkait yang relevan dengan perdagangan ASEAN, ACFTA, dan hubungan ekonomi ASEAN–Tiongkok. Kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada paradigma liberalisme dan teori kerja sama internasional, khususnya konsep absolute gains dan interdependence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan ASEAN dalam ACFTA meliputi penguatan pertumbuhan ekonomi kolektif, percepatan integrasi ekonomi regional, peningkatan daya tarik investasi asing langsung (FDI), serta upaya menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Selain itu, ACFTA juga dipandang sebagai instrumen strategis bagi ASEAN untuk meningkatkan posisi tawar kolektif dan mengelola ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok agar tidak menimbulkan dominasi eksternal yang merugikan negara-negara anggota. Dengan demikian, ACFTA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme liberalisasi perdagangan, tetapi juga sebagai sarana strategis ASEAN dalam mempertahankan kepentingan regional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan Asia Timur.*

**Kata kunci :** ASEAN, ACFTA, kerja sama internasional, kepentingan regional, liberalisme.

## Abstract

*The establishment of the ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) represents one of the most significant forms of regional economic cooperation in East Asia. This agreement reflects ASEAN's efforts to respond to the dynamics of globalization, trade liberalization, and the increasing role of China as a global economic power. This study aims to analyze ASEAN's interests in the ACFTA cooperation during the period 2018–2024. The main focus of this research is to examine how ASEAN formulates and safeguards its collective interests amid the economic opportunities and structural challenges arising from free trade integration with China. This study employs a descriptive qualitative approach using library research methods. Data were collected through the analysis of books, academic journals, official reports, and institutional publications relevant to ASEAN trade, ACFTA, and ASEAN–China economic relations. The analytical framework is based on the liberalism paradigm and theories of international cooperation, particularly the concepts of absolute gains and interdependence. The findings indicate that ASEAN's interests in ACFTA include strengthening collective economic growth, accelerating regional economic integration, increasing the attractiveness of foreign direct investment (FDI), and maintaining regional economic stability. Furthermore, ACFTA is viewed as a strategic instrument for ASEAN to enhance its collective bargaining position and to manage economic interdependence with China in order to prevent excessive external dominance that could be detrimental to member states. Thus, ACFTA functions not only as a mechanism for trade liberalization but also as a strategic means for ASEAN to safeguard its regional interests amid the evolving economic and geopolitical dynamics of East Asia.*

**Keyword:** ASEAN, ACFTA, international cooperation, regional interests, liberalism

## 1. PENDAHULUAN

Masalah ekonomi adalah masalah tanpa batas. Globalisasi yang semakin berkembang memudahkan negara untuk melakukan perdagangan internasional. Adanya perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi menyebabkan perdagangan akan menjadi semakin kompetitif, berbagai upaya dilakukan untuk menjalin berbagai kerjasama dibidang perdagangan untuk mengurangi berbagai hambatan antarnegara, sehingga integrasi antarnegara lebih kuat dan arus perdagangan lebih lancar. Di era globalisasi seperti ini pun, suatu negara harus mampu menguasai teknologi, maupun bersaing dengan negara lain dalam hal ekonomi dan pasar, sekaligus harus memiliki orang-orang yang berkualifikasi tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modernisasi. Kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan china dalam kerangka Asia-China free trade agreement sangat penting bagi industri dalam dan luar negeri. China merupakan suatu diantara negara yang paling digemari ASEAN karena keunggulan sistem ekonominya.

Dalam konteks Asia Tenggara sebagai mana yang disebut diatas , ASEAN mempunyai pasar yang amat besar bersama 10 negara lainnya yang merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok di prakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Melihat dari sudut pandang ASEAN, China merupakan mitra dagang yang sangat menguntungkan semenjak pertengahan tahun 1990an sejak saat itu kebanyakan produk ekspor negara-negara ASEAN yang dijual di China, karena ukuran yang sangat besar dan jumlah penduduk yang sangat besar, China dipandang sebagai pasar yang menjanjikan untuk menjual barang setiap negara di dunia, termasuk negara-negara ASEAN.

Beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan perubahan besar dalam dinamika perdagangan di Asia Timur, di mana keikutsertaan Cina dalam WTO pada akhir 2001 menjadi momen penting. Bagi negara-negara Asia Tenggara, ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), yang mulai mengurangi tarif pada 2005, telah menjadi salah satu perjanjian perdagangan regional terpenting dalam beberapa dekade terakhir, bersaing dengan ACFTA yang lebih lama . Pada KTT ASEAN pada bulan November 2000, para pemimpin ASEAN dan China sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi dengan tujuan pembentukan ACFTA. Keputusan ini merupakan respons alami terhadap sejumlah perkembangan penting global dan regional dalam satu dekade terakhir. Sejak penandatanganan perjanjian kerangka kerja, para pembuat kebijakan dari China dan negara-negara anggota ASEAN telah memulai negosiasi mereka mengenai persyaratan dan fitur khusus untuk usulan FTA ini. Meskipun FTA mempunyai potensi menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat besar, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di beberapa pihak, karena persepsi umum bahwa China sudah menjadi pesaing kuat dalam perdagangan dan menarik investasi asing (Tongzon, 2005). Studi ini mengeksplorasi dinamika ekonomi politik ACFTA di Indonesia, mengingat perdebatan seputar perjanjian tersebut telah memicu perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan negara.

Beberapa dekade terakhir, globalisasi telah menciptakan dinamika baru dalam sistem perdagangan internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin terdorong untuk memperkuat kerja sama ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem ekonomi global yang semakin kompetitif. Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh ASEAN adalah membentuk kerja sama perdagangan bebas dengan Republik Rakyat Tiongkok melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Cina dan enam anggota ASEAN pertama (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) dalam kerangka ACFTA, diwajibkan untuk mengeliminasi tarif atas sebagian besar barang hingga nol persen pada 2010. Tarif atas barang sensitif harus dikurangi menjadi maksimal 20% pada

2012, dan selanjutnya menjadi maksimal 5% pada 2018. Barang sangat sensitif harus mengalami pengurangan tarif hingga maksimal 50% pada 2015, tanpa keharusan pengurangan lebih lanjut setelahnya. Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar diberi waktu lebih lama untuk menyesuaikan tarif mereka, hingga 2015 untuk barang normal dan sangat sensitif, serta hingga 2020 untuk barang sensitive (Marks & Rahardja, 2012). Selain itu, semua negara diperbolehkan untuk mengecualikan beberapa barang dari perjanjian ini atas alasan moral atau keamanan nasional

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) atau sering disebut sebagai perjanjian ACFTA ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi adanya perdagangan internasional khususnya di negara-negara yang bergabung pada ASEAN. Perjanjian ini dibentuk atas dasar hukum internasional yang dibentuk dan mendapatkan persetujuan di PhnomPenh pada 4 November 2002 yakni disebut dengan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, baru kemudian secara resmi diberlakukan pada tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam pasal 8 pada perjanjian tersebut. ACFTA trade yang bertujuan agar menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang bebas agar dapat menurunkan serta menghapus setiap penghalang yang terjadi dalam perdagangan internasional. Globalisasi adalah salah satu fenomena yang tidak bisa di berhentikan lagi. Tidak ada lagi hambatan mobilisasi berupa produk jasa, tenaga kerja, dan modal. Tren globalisasi ini telah menyebabkan fenomena perdagangan bebas berskala lebih besar. Negara semakin memiliki keleluasaan untuk menjalin kerja sama perdagangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

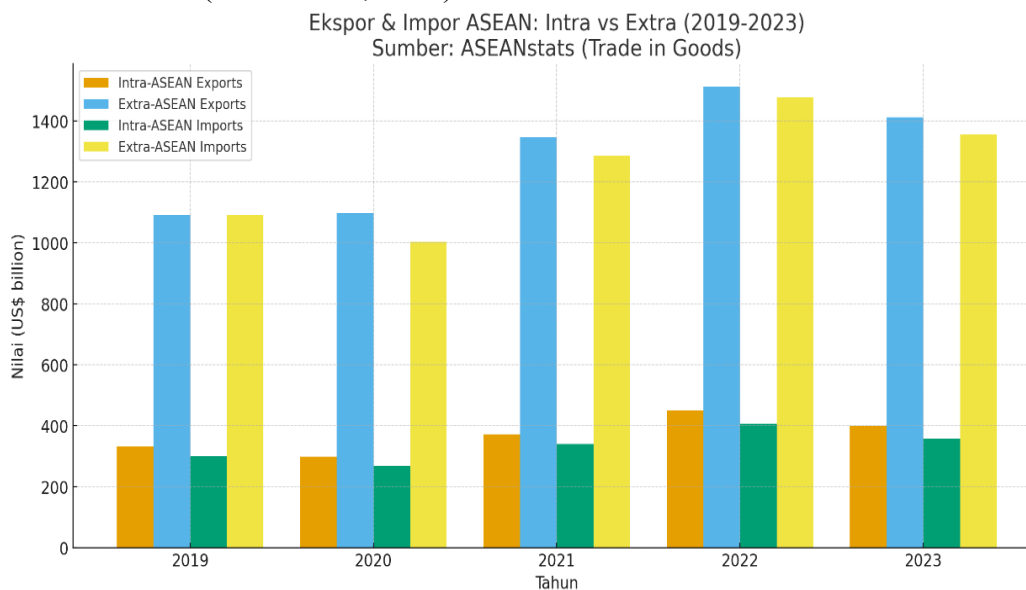
ACFTA dibentuk dalam dua tahapan yakni pertama pada tahun 2010 bersama negara pemrakarsa ASEAN dan yang kedua pada tahun 2012 bersama negara baru yang menjadi anggota ASEAN atas persetujuan ASEAN dan China (Dewi *et al*, 2018). ACFTA resmi diberlakukan pada 1 Januari 2010 dan mencakup 11 negara dengan total populasi lebih dari 1,8 miliar jiwa serta Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan lebih dari USD 17 triliun. Kesepakatan ini memberikan penghapusan tarif terhadap lebih dari 90% barang perdagangan antar anggota, dan telah memperkuat interdependensi ekonomi antara ASEAN dan China. Pada awal tahun 2010 dimulailah perdagangan bebas, yang artinya Asia Tenggara telah mengadopsi sistem perdagangan baru dengan China, yaitu sistem bebas hambatan. Tarif dan bea masuk yang dianggap sebagai hambatan dihilangkan sehingga semua barang yang diperdagangkan diperlakukan sama di kawasan. Terbentuknya perikatan ASEAN-China Free Trade Area termasuk pengaruh dari globalisasi, yang secara tidak lanjut memaksa negara negara untuk berkerjasama untuk mempertahankan integritasnya di dunia internasional. Kesepakatan China ASEAN Free Trade Area (ACFTA) menjelajahkan harga pengeluaran asal muatan muatan pendapatan 90% berperan nol. Negara-negara berkembang ASEAN akan dibanjiri muatan muatan ACFTA.

Perdagangan intra-ASEAN, yaitu aliran barang dan jasa yang terjadi antar negara anggota ASEAN, telah dipacu oleh kebijakan liberalisasi kawasan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), sehingga memperkuat integrasi rantai pasok regional dan mendorong spesialisasi produksi di dalam kawasan. Namun, meskipun ada peningkatan konektivitas dan fasilitasi perdagangan, proporsi perdagangan intra-ASEAN relatif lebih rendah dibandingkan perdagangan ASEAN dengan mitra eksternal. Sementara itu, perdagangan ekstra-ASEAN (perdagangan antara negara anggota ASEAN dan mitra di luar kawasan) tetap merupakan kontributor utama terhadap total ekspor dan impor kawasan, didorong oleh akses pasar melalui perjanjian perdagangan regional dan global, keunggulan komparatif pada produk tertentu, serta permintaan dunia yang dinamis, kombinasi faktor-faktor ini menempatkan ASEAN pada posisi yang sensitif terhadap perubahan kebijakan perdagangan eksternal dan fluktuasi permintaan internasional, sehingga mempertegas pentingnya kebijakan domestik dan kerja sama regional untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan rantai pasok.

Tahun 2020 membawa guncangan besar: pandemi COVID-19 memicu gangguan pasokan, penurunan permintaan serta pembatasan mobilitas sehingga aktivitas perdagangan termasuk intra-ASEAN mengalami kontraksi mendadak. Studi empiris tentang dampak COVID-19 dan analisis sektor

jasa/perdagangan menunjukkan gangguan tajam pada rantai pasok dan layanan lintas batas selama 2020, diikuti oleh pemulihan bertahap pada 2021–2022 seiring pelonggaran pembatasan dan penyesuaian rantai pasok. Pemulihan itu tercermin dalam kenaikan kembali volume perdagangan dan sedikit peningkatan rasio intra-ASEAN pada 2021–2022. (D’Alola, 2024).

Namun, keterbatasan infrastruktur logistik, hambatan non-tarif, dan perbedaan tingkat pengembangan antaranggota tetap menjadi penghambat pertumbuhan intra-ASEAN yang lebih kuat. Penelitian tentang kinerja logistik menunjukkan bahwa perbaikan logistik (biaya, waktu, dan konektivitas) berperan signifikan dalam mendorong perdagangan intra-kawasan—artinya tanpa perbaikan layanan logistik dan pengurangan hambatan non-tarif, potensi pertukaran barang antar anggota akan sulit dimaksimalkan. (Ardine et al, 2023)



Gambar 1. Data perdagangan ASEAN 2019-2023 (sumber: ASEAN stats-Trade in Goods).

Tabel 1. Data perdagangan ekspor dan import

| Tahun | Intra ASEAN Exports | Intra ASEAN Imports | Extra ASEAN Exports | Extra ASEAN Imports |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2019  | 332.3               | 300.3               | 1091.5              | 1092.3              |
| 2020  | 298.1               | 269.0               | 1098.6              | 1004.1              |
| 2021  | 372.0               | 339.9               | 10347.8             | 1287.2              |
| 2022  | 449.8               | 406.6               | 1512.3              | 1477.4              |
| 2023  | 399.9               | 359.1               | 1411.3              | 1355.5              |

Perdagangan ASEAN pada periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan baik pada lingkup intra maupun extra. Data memperlihatkan bahwa perdagangan intra-ASEAN relatif lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan extra-ASEAN, di mana porsi intra-ASEAN hanya berkisar antara 20-23% dari total perdagangan, sedangkan sisanya didominasi oleh perdagangan dengan mitra eksternal sebesar 77-80%. Pada tahun 2019 hingga 2020, terjadi penurunan nilai ekspor dan impor baik di intra maupun extra-ASEAN yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok dan permintaan global. Namun pada periode 2021-2022, perdagangan ASEAN kembali mengalami

pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pemulihan ekonomi global, tercermin dari lonjakan ekspor dan impor di kedua kategori. Memasuki tahun 2023, nilai perdagangan kembali mengalami penurunan baik pada intra-ASEAN maupun extra-ASEAN, yang mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi global serta menurunnya permintaan dari pasar utama di luar kawasan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ASEAN masih sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara di luar kawasan, meskipun perdagangan intra-ASEAN tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas regional dan menjadi salah satu pilar penting integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community (AEC).

Pemberlakuan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) merupakan bagian dari dinamika integrasi ekonomi regional yang bertujuan menghapus hambatan tarif dan non-tarif guna mendorong peningkatan arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota. Sejak implementasinya secara penuh pada tahun 2010, ACFTA telah membuka peluang pasar yang lebih luas, khususnya melalui penghapusan tarif atas lebih dari 90% pos tarif barang. Namun, di sisi lain, liberalisasi perdagangan ini juga menimbulkan tantangan serius bagi daya saing sektor domestik, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak ACFTA terhadap perekonomian Indonesia bersifat ambivalen. Samudra (2024) menemukan bahwa ACFTA secara signifikan meningkatkan volume perdagangan ASEAN–Tiongkok, dengan total perdagangan mencapai USD 878,2 miliar pada tahun 2021 dan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 10,47%. ACFTA juga diproyeksikan berkontribusi terhadap peningkatan PDB ASEAN dan Tiongkok. Meskipun demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa UKM Indonesia menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya produk impor murah dari Tiongkok yang memiliki tingkat daya saing tinggi. Ketidaksiapan UKM dalam menghadapi persaingan pasar bebas berpotensi mengancam keberlanjutan usaha, sekaligus meningkatkan ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Junaidi (2019) melalui pendekatan model gravitasi perdagangan internasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA berdampak positif terhadap peningkatan volume perdagangan, khususnya ekspor. Namun, pengaruh ACFTA terhadap neraca perdagangan Indonesia secara statistik tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor diikuti oleh peningkatan impor dalam proporsi yang relatif seimbang, sehingga tidak menghasilkan perbaikan yang berarti terhadap neraca perdagangan nasional. Dengan kata lain, manfaat ACFTA sangat ditentukan oleh tingkat daya saing struktural ekonomi domestik.

Berbeda dengan dua temuan sebelumnya, Malau (2017) menunjukkan bahwa penerapan ACFTA justru berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah ACFTA, penelitian ini menemukan peningkatan defisit neraca perdagangan Indonesia yang signifikan setelah ACFTA diberlakukan. Defisit neraca perdagangan meningkat dari rata-rata USD 5,66 miliar sebelum ACFTA menjadi USD 22,82 miliar setelah ACFTA. Hasil uji statistik memperkuat adanya perbedaan yang signifikan antara kedua periode tersebut, yang mengindikasikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam kerangka perdagangan bebas.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ACFTA berhasil meningkatkan intensitas perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia belum optimal dan bahkan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan serta keberlanjutan sektor domestik. Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya kesenjangan empiris terkait sejauh mana ACFTA benar-benar memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk

kepentingan ASEAN sebagai suatu organisasi regional secara kolektif dalam konteks ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, kepentingan, serta dinamika peran ASEAN dalam kerangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya menjelaskan dan menafsirkan fenomena hubungan ekonomi regional secara komprehensif berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Fokus utama kajian diarahkan pada kepentingan ASEAN sebagai organisasi regional dalam ACFTA, sekaligus mengkaji implikasi perjanjian tersebut terhadap proses regionalisasi ASEAN dalam konteks hubungan ASEAN-Tiongkok. Proses penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, media massa, media daring, serta situs-situs resmi yang berkaitan dengan ASEAN, ACFTA, dan hubungan ekonomi ASEAN-Tiongkok. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas data guna mendukung kedalaman analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup konsep teoretis, kebijakan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan ACFTA dan kepentingan ASEAN. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menafsirkan informasi yang relevan guna memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis mengenai fokus kajian.

Untuk menjaga fokus dan relevansi pembahasan, penelitian ini dibatasi pada analisis kepentingan ASEAN sebagai entitas kolektif dalam pelaksanaan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Penelitian ini tidak membahas secara mendalam kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN secara individual, melainkan menitikberatkan pada peran, sikap, dan kepentingan ASEAN sebagai organisasi regional dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar analisis lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepentingan ASEAN dalam ASEAN-China *Free Trade Area***

Kepentingan ASEAN sebagai organisasi regional kolektif tercermin melalui berbagai dimensi strategis yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan geopolitik kawasan. Secara umum, ASEAN memandang ACFTA sebagai instrumen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat integrasi kawasan, menarik investasi asing, menjaga stabilitas regional, serta melindungi otonomi dan kepentingan kolektif ASEAN di tengah meningkatnya pengaruh negara besar.

ASEAN memandang ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) sebagai instrumen strategis yang memiliki nilai signifikan bagi kepentingan kolektif kawasan, terutama dalam konteks dinamika ekonomi dan geopolitik Asia Timur yang terus berkembang. Sebagai organisasi regional, ASEAN melihat ACFTA

bukan sekadar mekanisme liberalisasi perdagangan, tetapi juga sebagai platform untuk memperkuat integrasi ekonomi internal dan meningkatkan daya saing kawasan di tengah persaingan global yang semakin intensif. Melalui ACFTA, ASEAN memperoleh akses yang lebih luas ke salah satu pasar terbesar di dunia, yang memungkinkan peningkatan ekspor, diversifikasi produk, serta penguatan jaringan produksi regional. Reformasi tarif dan non-tarif dalam ACFTA juga mendorong efisiensi ekonomi di tingkat domestik sekaligus mempercepat aliran perdagangan intra-Asia, sehingga memperkuat konektivitas supply chain antara ASEAN dan China. Dari perspektif investasi, keberadaan ACFTA meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai destinasi FDI karena kawasan ini dipandang sebagai pusat produksi yang terintegrasi dengan pasar China, sehingga memberikan insentif bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan atau memperluas basis produksi mereka di Asia Tenggara.

ACFTA memiliki implikasi geopolitik yang signifikan bagi ASEAN. Dalam lanskap regional yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar, terutama China dan Amerika Serikat, ASEAN memanfaatkan ACFTA sebagai alat untuk mempertahankan relevansi strategisnya serta memperkuat otonomi kolektif dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan menciptakan kerangka kerja sama ekonomi yang stabil dan terinstitusionalisasi bersama China, ASEAN dapat menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan global lainnya sekaligus menjaga agar kawasan tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. Selain itu, ACFTA berfungsi sebagai sarana bagi ASEAN untuk memperdalam peran sentralnya (ASEAN centrality) dalam arsitektur regional Asia Timur, karena memberikan ASEAN posisi tawar yang lebih kuat dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN+3, East Asia Summit, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Melalui penguatan institusional semacam ini, ASEAN berupaya memastikan bahwa proses integrasi kawasan tidak sepenuhnya didominasi oleh negara besar dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN, yakni konsensus, saling menghormati, dan non-intervensi.

Di samping aspek ekonomi dan geopolitik, ACFTA juga penting bagi ASEAN dalam rangka memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan. Kerangka perdagangan bebas yang disepakati dengan China menciptakan insentif bagi kedua pihak untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, terutama di tengah isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan. Walaupun ACFTA tidak secara langsung menangani isu keamanan, intensifikasi hubungan ekonomi diyakini berkontribusi pada munculnya economic interdependence, yang secara teori dapat menurunkan kemungkinan konflik terbuka dan meningkatkan komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi. Dengan demikian, ACFTA berfungsi sebagai elemen pendukung dalam strategi ASEAN untuk menjaga stabilitas regional, meminimalkan dominasi unilateral, dan memperkuat tatanan kawasan yang berbasis pada kerja sama.

### **1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kolektif ASEAN**

Sebagai blok ekonomi regional, ASEAN berkepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama melalui perluasan akses pasar dan peningkatan arus perdagangan. Setelah implementasi ACFTA, ekspor ASEAN ke Tiongkok menunjukkan peningkatan signifikan, yang berdampak langsung pada penguatan aktivitas perdagangan dan peningkatan nilai ekspor kawasan secara keseluruhan. Selain itu, ketergantungan ASEAN terhadap pasar eksternal menjadi lebih stabil melalui diversifikasi tujuan perdagangan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Kepentingan ekonomi ini sejalan dengan paradigma liberalisme yang menekankan pencapaian absolute gains melalui kerja sama antarnegara. Dalam perspektif ini, ASEAN memandang ACFTA sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan kolektif, bukan sebagai arena persaingan zero-sum yang saling merugikan. Kepentingan ekonomi ini sejalan dengan paradigma liberalisme, yang menekankan bahwa kerja sama dapat menghasilkan absolute gains bagi semua pihak. ASEAN memandang ACFTA sebagai sarana mencapai pertumbuhan bersama, bukan kompetisi zero-sum.

ASEAN memiliki kepentingan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kolektif melalui mekanisme liberalisasi perdagangan yang diwadahi oleh ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA). Sebagai blok ekonomi regional, ASEAN berupaya meningkatkan kinerja ekonominya dengan memperluas akses pasar dan memperbesar volume perdagangan eksternal, terutama dengan mitra ekonomi besar seperti China. Implementasi ACFTA telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perdagangan kawasan, terlihat dari meningkatnya ekspor ASEAN ke China dalam berbagai sektor seperti komoditas primer, manufaktur, dan produk bernilai tambah. Peningkatan ekspor ini tidak hanya memperbesar kontribusi perdagangan terhadap PDB negara-negara ASEAN, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi domestik melalui bertambahnya permintaan terhadap produksi lokal, peningkatan kapasitas industri, serta perluasan lapangan kerja. Selain itu, ACFTA membantu ASEAN dalam mencapai diversifikasi tujuan perdagangan yang lebih seimbang, sehingga ketergantungan kawasan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Jepang menjadi berkurang. Diversifikasi ini secara langsung meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi ASEAN terhadap gejolak eksternal, termasuk fluktuasi permintaan global, krisis finansial internasional, dan dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi volatilitas pasar.

Dalam perspektif teori hubungan internasional, kepentingan ekonomi ASEAN melalui ACFTA dapat dipahami sejalan dengan paradigma liberalisme yang menekankan bahwa kerja sama antarnegara mampu menghasilkan absolute gains bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam kerangka liberal, ACFTA dipandang sebagai platform yang mendorong kolaborasi, bukan sebagai arena kompetisi zero-sum di mana keuntungan satu pihak dipandang sebagai kerugian pihak lain. ASEAN memandang liberalisasi perdagangan melalui ACFTA sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat integrasi pasar, dan mendorong pertumbuhan kolektif melalui mekanisme saling ketergantungan ekonomi. Dengan semakin terintegrasinya ASEAN dalam jaringan produksi dan perdagangan regional yang melibatkan China, negara-negara anggota memperoleh manfaat ekonomi yang tidak dapat dicapai secara individual. Oleh karena itu, ACFTA tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian perdagangan bebas, tetapi juga sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi regional ASEAN yang berorientasi jangka panjang serta sebagai penopang utama bagi upaya kawasan dalam mempertahankan daya saing di tengah dinamika ekonomi global yang kompetitif.

## 2. Mendorong Integrasi Regional

ASEAN memiliki visi jangka panjang dalam mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) sebagai pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi. Implementasi ACFTA mempercepat proses integrasi tersebut melalui pembukaan konektivitas perdagangan yang lebih luas, penyelarasan standar produk antar negara, dan peningkatan efisiensi rantai pasok regional. Dengan semakin eratnya integrasi ekonomi ASEAN dengan Tiongkok, ASEAN berhasil memperkuat posisinya sebagai pusat penting (hub) perdagangan kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan dalam kompetisi ekonomi global.

ASEAN menempatkan integrasi regional sebagai salah satu tujuan strategis jangka panjang melalui pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, implementasi ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) memainkan peran penting sebagai pendorong eksternal yang mempercepat proses integrasi ekonomi internal ASEAN. ACFTA membuka akses perdagangan yang lebih luas, menurunkan hambatan tarif dan non-tarif, serta meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara ASEAN dan China. Pembukaan konektivitas perdagangan ini mendorong harmonisasi standar produk, regulasi teknis, dan prosedur perdagangan lintas negara, yang secara tidak langsung memperkuat penyelarasan kebijakan ekonomi antar-negara ASEAN sendiri. Peningkatan harmonisasi ini penting bagi pembentukan AEC, karena integrasi produksi dan pasar tunggal hanya dapat tercapai apabila

negara-negara anggota memiliki standar, mekanisme, dan sistem perdagangan yang kompatibel dan efisien.

ACFTA memperkuat efisiensi rantai pasok regional dengan menghubungkan basis produksi ASEAN ke dalam jaringan produksi China yang telah terintegrasi secara global. Keterhubungan ini meningkatkan kemampuan ASEAN untuk berpartisipasi dalam regional value chains dan global value chains melalui pembagian kerja yang lebih efektif, peningkatan spesialisasi sektor industri, dan penurunan biaya logistik. Dengan semakin intensifnya kegiatan produksi lintas negara dan aliran investasi intra-regional, ASEAN secara bertahap memperkuat posisinya sebagai pusat penting (hub) perdagangan dan manufaktur di Asia Timur dan Asia Pasifik. Konektivitas yang lebih erat dengan China juga meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai destinasi investasi global karena perusahaan multinasional melihat kawasan ini sebagai titik strategis yang menghubungkan dua pasar besar: pasar internal ASEAN dan pasar China. Dalam konteks kompetisi ekonomi global, posisi sebagai regional hub ini memberikan keuntungan strategis bagi ASEAN untuk memperluas integrasi ekonomi, meningkatkan daya saing kawasan, serta memastikan bahwa ASEAN tetap relevan dalam arsitektur ekonomi regional yang terus berkembang pesat.

### **3. Menarik Foreign Direct Investment (FDI)**

ASEAN memiliki visi jangka panjang dalam mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) sebagai pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi. Implementasi ACFTA mempercepat proses integrasi tersebut melalui pembukaan konektivitas perdagangan yang lebih luas, penyelarasan standar produk antar negara, dan peningkatan efisiensi rantai pasok regional. Dengan semakin eratnya integrasi ekonomi ASEAN dengan Tiongkok, ASEAN berhasil memperkuat posisinya sebagai pusat penting (hub) perdagangan kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan dalam kompetisi ekonomi global.

Dalam konteks dinamika ekonomi global, salah satu kepentingan utama ASEAN dalam implementasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah meningkatkan arus Foreign Direct Investment (FDI) sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan industri regional. Melalui ACFTA, ASEAN memperoleh akses ke salah satu sumber investasi terbesar di dunia, yaitu Tiongkok, yang memiliki kapasitas finansial kuat serta orientasi strategis untuk mengekspansi jaringan produksinya ke Asia Tenggara. Integrasi tarif yang lebih rendah, harmonisasi prosedur perdagangan, serta kepastian regulasi yang lebih tinggi melalui perjanjian ini menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif, sehingga meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai lokasi relokasi industri manufaktur, teknologi, dan jasa berbasis nilai tambah. Selain itu, ACFTA juga menempatkan ASEAN sebagai bagian integral dari regional production network yang terhubung dengan supply chain Tiongkok, mendorong munculnya klaster produksi lintas negara yang mampu meningkatkan efisiensi biaya dan memperluas kapasitas ekspor ASEAN.

Keterhubungan ini memperbesar peluang negara-negara ASEAN untuk mendapatkan spillover positif seperti transfer teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, adopsi standar industri global, serta penguatan infrastruktur ekonomi. Dalam jangka panjang, peningkatan FDI yang dipicu oleh ACFTA tidak hanya mempercepat modernisasi ekonomi negara-negara ASEAN, tetapi juga memperkuat integrasi kawasan secara keseluruhan, memastikan bahwa ASEAN tetap kompetitif dan relevan dalam lanskap ekonomi internasional yang semakin dipengaruhi oleh rivalitas kekuatan besar dan restrukturisasi rantai pasok global.

### **4. Menjaga Stabilitas Ekonomi Kawasan**

Kerja sama ekonomi melalui ACFTA memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. ASEAN memandang hubungan ekonomi sebagai alat untuk menstabilkan hubungan bilateral dengan

Tiongkok dan memitigasi ketegangan geopolitik, terutama terkait isu Laut Cina Selatan. Hubungan ekonomi yang saling bergantung menciptakan kondisi dimana potensi konflik menjadi tidak rasional, karena biaya ekonomi yang ditimbulkan akan sangat besar bagi kedua pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan liberalisme mengenai interdependence sebagai dasar terciptanya stabilitas dan perdamaian regional.

Kerja sama ekonomi yang terjalin melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama dalam konteks dinamika geopolitik Asia Tenggara yang sarat dengan potensi ketegangan. ASEAN memandang ACFTA bukan semata-mata sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai mekanisme diplomasi ekonomi (economic statecraft) yang mampu menciptakan hubungan saling ketergantungan (complex interdependence) antara ASEAN dan Tiongkok. Dalam kerangka ini, arus perdagangan yang meningkat pesat, integrasi rantai pasok yang semakin kuat, serta tingginya investasi lintas kawasan membentuk struktur kepentingan bersama yang membuat konflik menjadi semakin tidak rasional, baik secara ekonomi maupun politik. Logika ini sejalan dengan teori liberalisme, yang menekankan bahwa hubungan ekonomi yang intensif dapat menurunkan insentif negara untuk menggunakan kekerasan, karena biaya instabilitas akan jauh lebih tinggi dibandingkan potensi manfaat politik yang diperoleh dari tindakan konfrontatif.

Relevansi ACFTA sebagai instrumen stabilitas sangat terlihat dalam isu Laut Cina Selatan, wilayah yang menjadi titik sensitif geopolitik dan sumber ketegangan antara beberapa negara ASEAN dan Tiongkok. Meskipun perbedaan kepentingan tetap ada, integrasi ekonomi melalui ACFTA menciptakan kanal komunikasi dan hubungan interdependensi yang memberikan batasan rasional pada tindakan kedua pihak. ASEAN menilai bahwa semakin besar keterkaitan ekonomi dengan Tiongkok, semakin besar pula insentif bagi Beijing untuk mempertahankan lingkungan yang stabil demi kelangsungan akses pasar, kelancaran rantai pasok, dan keberlanjutan investasi. Sebaliknya, bagi ASEAN, ketergantungan pada pasar Tiongkok baik sebagai tujuan ekspor maupun sumber investasi menjadikan stabilitas kawasan sebagai prasyarat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Lebih jauh, stabilitas ekonomi kawasan yang diperkuat melalui ACFTA juga membantu ASEAN meningkatkan ketahanan (resilience) terhadap guncangan eksternal, seperti krisis keuangan global, ketidakpastian pasar internasional, atau disrupsi rantai pasok global. Dengan memperluas jejaring ekonomi dan diversifikasi mitra dagang, ASEAN dapat mengurangi volatilitas yang dihasilkan dari ketergantungan berlebihan pada pasar tertentu. Hal ini memberi kontribusi pada lingkungan ekonomi kawasan yang lebih konsisten, dapat diprediksi, dan kondusif bagi investasi. Oleh karena itu, ACFTA tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian liberalisasi perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme struktural yang memperluas kepentingan bersama ASEAN dan Tiongkok, meminimalkan risiko konflik, serta memperkuat stabilitas dan perdamaian regional dalam jangka panjang.

## **5. Melindungi Kepentingan Kolektif ASEAN dari Dominasi Eksternal**

Walaupun Tiongkok merupakan mitra dagang utama, ASEAN tetap berupaya menjaga otonomi dan kemandirian ekonomi kawasan. Dalam struktur ACFTA, ASEAN menerapkan daftar produk sensitive dan highly sensitive sebagai instrumen perlindungan terhadap sektor industri tertentu, serta mempertahankan mekanisme konsultasi untuk mencegah ketergantungan ekonomi yang berlebihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ASEAN bukanlah aktor pasif, melainkan aktor regional yang secara kolektif berusaha menyeimbangkan hubungan ekonomi dan mempertahankan stabilitas politik serta ekonomi kawasan.

Meskipun Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu mitra dagang terbesar dan paling berpengaruh bagi negara-negara ASEAN, organisasi regional ini tetap menempatkan perlindungan terhadap kepentingan kolektif dan otonomi strategis kawasan sebagai prioritas utama dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Kesadaran bahwa hubungan ekonomi yang erat dapat

menciptakan risiko ketergantungan berlebihan mendorong ASEAN untuk mengadopsi berbagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan tersebut. Salah satu mekanisme utama adalah penerapan sensitive list dan highly sensitive list, yaitu kategori produk yang dilindungi dari liberalisasi penuh karena memiliki nilai strategis bagi pembangunan industri domestik. Melalui mekanisme ini, ASEAN dapat mempertahankan perlindungan terhadap sektor-sektor yang rentan atau memiliki arti penting bagi pembangunan jangka panjang, seperti pertanian, industri manufaktur tertentu, serta komoditas vital yang menjadi sumber pendapatan domestik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ASEAN bukan hanya mengikuti dinamika pasar global, tetapi juga secara aktif mengelola tingkat keterbukaannya untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan struktural yang dapat melemahkan daya saing negara-negara anggotanya.

Selain perlindungan sektor industri, ASEAN juga menerapkan berbagai mekanisme konsultasi dan dialog struktural sebagai bagian dari strategi hedging untuk menyeimbangkan interaksi dengan Tiongkok. Melalui forum-forum formal seperti ASEAN-China Joint Committee on Economic Cooperation serta pertemuan tingkat menteri, ASEAN dapat menyampaikan kekhawatiran, mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan, dan mendorong negosiasi yang lebih simetris. Pendekatan kolektif ini mencerminkan upaya ASEAN untuk menghindari pola hubungan yang bersifat asimetris, yang berpotensi membuat negara anggota terlalu bergantung pada ekonomi Tiongkok. Dengan mempertahankan pendekatan berbasis konsensus dan kepemimpinan kolektif (collective leadership), ASEAN berusaha membangun kapasitas tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan eksternal, termasuk Tiongkok.

Pendekatan ASEAN tersebut selaras dengan kerangka teori institutionalism dan regional autonomy, yang menekankan pentingnya institusi regional dalam mengatur perilaku negara-negara anggota dan mencegah dominasi dari aktor eksternal. Di sisi lain, strategi ini juga menunjukkan bahwa ASEAN bukanlah aktor pasif dalam sistem internasional, tetapi entitas regional yang berusaha memaksimalkan manfaat dari interaksi ekonomi sambil meminimalkan risiko geopolitik dan ekonomi. Dengan menempatkan ACFTA sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan dan bukan sebagai aturan yang bersifat memaksa, ASEAN mampu menjaga fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi dan mempertahankan stabilitas kawasan. Secara keseluruhan, upaya untuk melindungi kepentingan kolektif ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa proses integrasi ekonomi dengan Tiongkok tetap berlangsung secara seimbang, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan kemandirian strategis kawasan Asia Tenggara.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan mengenai Kepentingan ASEAN dalam Kerjasama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada periode 2018–2024, dapat disimpulkan bahwa ACFTA merupakan instrumen strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan Asia Tenggara. ACFTA tidak hanya mendorong peningkatan arus perdagangan dan investasi, tetapi juga memperkuat posisi tawar ASEAN sebagai blok ekonomi regional dalam sistem perdagangan internasional yang semakin kompetitif.

Secara ekonomi, ACFTA telah berkontribusi besar dalam memperluas akses pasar, meningkatkan volume ekspor-impor, serta mendukung pemulihan ekonomi ASEAN pasca pandemi COVID-19. Data perdagangan 2019–2023 menunjukkan bahwa perdagangan ekstra-ASEAN, termasuk dengan Tiongkok, mendominasi sekitar 77–80% total perdagangan kawasan, sedangkan perdagangan intra-ASEAN hanya berada pada kisaran 20–23%. Dominasi perdagangan ekstra-ASEAN mencerminkan bahwa ACFTA

mempunyai peran krusial dalam menopang ketergantungan ekonomi kawasan terhadap pasar eksternal dan memperkuat daya saing ASEAN di pasar global.

Dari aspek strategis dan geopolitik, ACFTA memperkuat stabilitas regional melalui penciptaan interdependensi ekonomi yang mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas keamanan kawasan. Interdependensi yang dibangun melalui ACFTA menjadi mekanisme penting bagi ASEAN untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam rivalitas geopolitik Asia Pasifik, khususnya dalam konteks hubungan ASEAN–Tiongkok yang sering diwarnai isu sensitif seperti Laut Cina Selatan.

Secara teoritis, implementasi ACFTA sejalan dengan paradigma liberalisme dan teori kerja sama internasional Robert Keohane. Liberalisme menekankan potensi keuntungan absolut (*absolute gains*) yang dapat dicapai melalui kerja sama ekonomi dan institusional. Keohane menekankan bahwa institusi internasional mampu menciptakan aturan dan mekanisme tata kelola yang menurunkan ketidakpastian, biaya transaksi, dan risiko konflik. ACFTA merupakan wujud nyata dari *institutional cooperation* yang menciptakan *complex interdependence*, yaitu kondisi saling ketergantungan ekonomi yang membuat konflik terbuka menjadi tidak rasional karena akan merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, kepentingan ASEAN dalam ACFTA tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis jangka panjang, yaitu memperkuat integrasi regional, stabilitas kawasan, dan posisi tawar ASEAN dalam percaturan ekonomi dan geopolitik global.

## 5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk pengembangan kerja sama ASEAN dalam kerangka ACFTA. ASEAN perlu memperkuat integrasi ekonomi internal melalui peningkatan konektivitas perdagangan intra-ASEAN serta harmonisasi kebijakan ekonomi antarnegara anggota agar manfaat ACFTA tidak bergantung secara berlebihan pada pasar eksternal. Selain itu, diversifikasi pasar dan mitra perdagangan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang terlalu besar terhadap Tiongkok dan menjaga stabilitas ekonomi kawasan dalam jangka panjang.

Pemerintah negara-negara ASEAN juga diharapkan meningkatkan daya saing industri domestik, khususnya sektor UMKM, melalui pemberian dukungan teknologi, pelatihan kompetensi, serta akses pembiayaan, sehingga pelaku usaha lokal mampu meningkatkan nilai daya saing dalam menghadapi persaingan produk impor. Di sisi lain, optimalisasi diplomasi ekonomi perlu terus dilakukan untuk memanfaatkan ACFTA sebagai instrumen strategis dalam memperkuat posisi tawar ASEAN di tingkat regional dan global, terutama terkait isu geostrategis seperti Laut Cina Selatan.

Selanjutnya, ASEAN perlu membangun sistem evaluasi berkala terkait implementasi ACFTA guna mengidentifikasi dampak nyata terhadap struktur perdagangan dan sektor industri serta mengantisipasi tantangan yang muncul dari ketimpangan distribusi manfaat. Untuk melindungi sektor yang rentan, negara-negara anggota ASEAN perlu memperkuat kebijakan perlindungan domestik melalui pengelolaan daftar komoditas sensitif dan sangat sensitif (*sensitive dan highly sensitive products*) secara lebih efektif. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerja sama ACFTA mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh negara anggota ASEAN secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Alleyne, A., Zhaoyong, Z dan Yifei, M. 2020. Sustaining International Trade with China: Does ACFTA Improve ASEAN Export Efficiency?. *Journal Sustainability*. 12(6):1-26.
- [2]. Amara Putri N. S. 2022. *Hubungan Internasional: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran (BAB II)*. Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).
- [3]. Arafat, Achmad Fatih. 2024. “Diplomasi Budaya Populer Jepang dalam Mencapai Kepentingan Nasionalnya melalui Perspektif Liberalisme.” *Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga*.
- [4]. ASEAN Secretariat. (n.d.). *ASEANstats: Trade in Goods (IMTS) / Intra-Extra ASEAN trade data*. Jakarta: ASEAN Secretariat. (Database/statistik resmi untuk data perdagangan intra dan ekstra ASEAN.)
- [5]. Aswad, H dan Zulfa, A. 2021. Pengaruh ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) Terhadap Impor Telepon Asal China di ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 10(2): 154-175.
- [6]. Auliya Kusnadi, Novita, Jannah Afa Aprilia, Annisa Putri Ayu Dea, Durrotunnisa, dan Rafly Dinasty. 2022. *Transisi Energi: Kerjasama Indonesia-IEA (International Energy Agency) terhadap Perkembangan Energi Terbarukan*. Seminar Nasional TREN-D – *Technology of Renewable Energy and Development*, FTI Universitas Jayabaya
- [7]. Baida Soraya. Analisis Pengaruh Perdagangan Intra-Regional dan Ekstra- Regional ASEAN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN. Vol.02 - No.04 - 14
- [8]. Batubara, Ulfah Nury, Royhanun Siregar, and Nabilah Siregar. 2021. “Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatanan Kehidupan.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 4: 485–490.
- [9]. Colin Koh-King Wong a., Venus Khim-Sen Liew b., Mohammad Affendy Arip. 2021. Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok Terhadap Perdagangan Bilateral.
- [10]. Diah Wahyuningsih. 2011. Analisis Perdagangan Intra Industri Sektor Manufaktur: Studi Kasus ASEAN-5, Vol 6, No 1: 23-32
- [11]. Federico D’Aloia, Philippe Gugler. 2024. Impact of Covid-19 on the Economic Growth of ASEAN Countries: Convergence or Divergence?
- [12]. Habibi, M.A dan Sishidayati. 2023. Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Kasus ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (21) : 442-449.
- [13]. Haryanto, Ichwan. 2015. *Proses Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Perancis Utara dalam Menerapkan Konsep “Blue Economy” di Kawasan Madura Kabupaten Sapeke*. *Jurnal Global & Policy*, Vol. 3 No. 1, Januari–Juni 2015. UPN “Veteran” Jawa Timur.
- [14]. Imani, Dinar Arsy Azzahra. 2022. *Neoliberalisme: Kerja Sama Bilateral antara Indonesia-Ceko dalam Perlindungan Lingkungan Hidup*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- [15]. Julina, S. 2022. ACFTA (ASEAN -CHINA FREE TRADE AREA): Menguntungkan atau Merugikan Indonesia ? Ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme. *Jurnal Alternatif* . Vol 2 (1) : 2-18